

**PENGARUH EVALUASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN  
TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT ACEH DI PEMERINTAH ACEH**

**Abd. Aziz<sup>1</sup>, Akmal Riza<sup>2</sup>, Anwar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2</sup>Staf Pengajar Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

<sup>3</sup>Staf Pengajar Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

***Abstract:** The purposes of this research were to determine the effect of the evaluation of budgeting and budget goal clarity on management performance financial of regions both simultaneously and partially. Population studies were conducted in 48 SKPA using purposive sampling technique amounted to 144 (respondents) who are officers working within the Aceh Government. The analytical method used is multiple linear regression with hypothesis testing. The results showed that, the budget evaluation and budget goal clarity either simultaneously or partially significant effect on management performance financial of regions.*

***Keywords:** Budget evaluation, budget goal clarity, management performance financial of regions*

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam PP No. 105/2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah yang dituangkan dalam kerangka Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Pengelola keuangan daerah selaku pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu.

Anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya perubahan dalam hal pertanggungjawaban dari pertanggungjawaban vertikal ke pertanggungjawaban horizontal menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran.

Penerapan anggaran bertujuan untuk

dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.

Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2006:84).

Penganggaran berbasis kinerja juga diatur dalam Permendagri No. 13/2006 dan diubah lagi dengan Permendagri No. 59/2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Rencana kerja daerah dalam RKA-SKPD untuk memenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya hasil yang optimal atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif serta pengeluaran yang dialokasi sesuai dengan kejelasan sasaran anggaran yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006:171). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Lebih lanjut menurut Bastian (2006:275), pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Pemerintah Aceh telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran sejak tahun 2005. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik sesuai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai serta pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dalam proses penganggaran pada masing-masing perangkat daerah.

Selama lima tahun terakhir pada SKPA Pemerintah Aceh masih mengalami penurunan tingkat realisasinya dibandingkan belanja daerah yang sering meningkat setiap tahunnya sehingga peran pengelola keuangan daerah harus lebih memperhatikan tingkat realisasi dari pendapatan daerah. Hal ini juga belum meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada SKPA di Pemerintah Aceh, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan audit oleh Badan pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemerintah Aceh TA 2011-2013 memperoleh opini Wajar dengan pengecualian (WDP) ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Sehingga harus ditingkatkan kompetensi dalam penyusunan langkah strategis dan rencana untuk meningkat opini dalam mengelola keuangan daerah.

Munawar (2006) menjelaskan evaluasi penganggaran merupakan salah satu penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksanaan anggaran yang bertanggung jawab. Pemerintah daerah selalu mengevaluasi setiap proses anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan perencanaan sebelumnya sehingga terciptanya akuntabilitas publik.

Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap

kinerja aparatur pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, namun pada saat pelaksanaan mereka tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga membuat kinerja mereka menjadi rendah (Munawar, 2006).

Hasil penelitian tentang evaluasi anggaran terhadap kinerja SKPD yang dilakukan oleh Jalaluddin dan Bahri (2009) mereka menemukan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah. Hal ini terjadi karena evaluasi anggaran yang dilakukan atas penyimpangan yang telah dilakukan sebuah organisasi atau instansi kurang terdeteksi dengan baik, evaluasi ini hanya dilakukan oleh pejabat kalangan tertentu saja sehingga kompetensi dalam melakukan evaluasi sangatlah kurang (Kennis, 1979). Akibat kurang terdeteksinya anggaran yang dapat dicapai dan belum dicapai.

Keberhasilan pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh kualitas proses penganggaran karena pengukuran kinerja merupakan mata rantai yang berkesinambungan dengan proses penganggaran. Kenis (1979) mengatakan salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut.

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi kurang tepat. Hal ini akan menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979).

Menurut Dessler (2000:268) analisis kinerja perlu dilakukan untuk memverifikasi bahwa ada kemerosotan kinerja dan menetapkan apakah kemerosotan ini sebaiknya diperbaiki melalui pelatihan atau melalui sarana lain. Michael dan Troy (2000) menjelaskan untuk mengukur kinerja sebuah pemerintah lokal dalam perbandingannya dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan akuntabel oleh pemerintah lokal. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah para pembuat kebijakan dan profesional harus merumuskan visi dan tujuan dari rencana strategis mereka dengan menggunakan input dari masyarakat/publik. Jika input dari masyarakat ini tidak diakomodasi maka akan mengundang kritikan, walaupun pemerintahan lokal sudah melaksanakan secara efisien sekalipun. Pengukuran kinerja tentunya tidak sebatas pada masalah pemakaian anggaran, namun lebih dari itu. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam pencapaian kinerja tersebut.

Hasil penelitian sebelumnya tentang kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja yang dilakukan oleh Bangun (2009), kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, kemudian penelitian Sari et al. (2009) dan Nadirsyah et al. (2012) menemukan hal yang sama yakni kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap sikap aparat dalam menilai kinerja SKPD pemerintah daerah.

Penelitian, ini bertujuan untuk melihat pengaruh evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran secara baik simultan maupun parsial terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada SKPA di Pemerintah.

## KAJIAN KEPUSTAKAAN

### **Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Evaluasi anggaran dilaksanakan sebagai dasar penilaian kinerja unit kerja. Kenis (1979) menyimpulkan bahwa evaluasi anggaran dengan kinerja memiliki kecenderungan hubungan yang lemah. Manajer memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam evaluasi kinerja dalam suatu gaya punitif (meningkatkan ketegangan kerja, menurunkan kinerja

anggaran). Kecenderungan hubungan antar variabel menjadi lemah.

Munawar (2006) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Kab. Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dan pada pelaksanaan anggaran, mereka juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga kinerja mereka menjadi lebih baik. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, karena evaluasi anggaran diharapkan akan meningkatkan kinerja para individu yang terlibat di dalamnya, Dengan demikian, evaluasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Locke (1968) menyatakan bahwa mencantumkan sasaran anggaran secara spesifik agar lebih produktif dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik dan akan mendorong pegawai melakukan yang terbaik.

Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran kinerja suatu unit kerja organisasi dinilai baik secara finansial. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan aparat untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah daerah, sebaliknya apabila tidak adanya kejelasan sasaran anggaran aparat akan memiliki sedikit informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan dan target-target telah ditetapkan sebelumnya.

Nurhalimah et al. (2013) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai sasaran dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.

### Hipotesis Penelitian

1. Evaluasi Anggaran dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
2. Evaluasi Anggaran berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

### METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA pada 48 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di lingkungan pemerintah Aceh.

Untuk melakukan pengambilan sampel, dilakukan pengambilan secara *purposive sampling* yaitu aparat yang telah bekerja di atas lima tahun dan aparat yang hanya menangani masalah keuangan (pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah), dimana setiap SKPA diambil 3 (tiga) orang (responden) yang mewakili SKPANYA masing-masing yaitu PA, KPA, Bendahara, PPTK dan atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPA) yang berjumlah 144 orang.

### Operasionalisasi Variabel Penelitian

#### 1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Penilaian hasil kerja yang dapat dicapai oleh SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan yang dilimpahkan kepadanya selama suatu periode tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Indikator atau elemen dan alat ukur yang digunakan dengan melihat antara lain: tingkat pencapaian APBA pada masing-masing SKPA Pemerintah Aceh, adanya keselarasan antara laporan dengan pelaksanaan yang efisien, efektif, dan transparan, tersedianya aplikasi dalam penyiapan laporan keuangan. Skala yang digunakan adalah skala interval.

#### 2. Evaluasi Anggaran

Evaluasi penganggaran merupakan tindakan yang diperbuat untuk menyelidiki penyimpangan atas anggaran ke sebuah

organisasi yang terlibat dan digunakan untuk dasar penilaian kinerja organisasi tersebut. Evaluasi penganggaran bisa dilihat dari laporan anggaran dibandingkan dengan yang sebenarnya terjadi (Kenis (1979). Indikator atau elemen dan alat ukur yang digunakan dikembangkan dari PP No. 58/2005 dan Permendagri No.13/2006 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59/2007. Skala yang digunakan adalah skala interval.

### 3. Kejelasan Sasaran Anggaran

Luasnya sasaran anggaran yang telah dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Sasaran anggaran yang telah disetujui harus jelas dan dapat dipastikan mengenai target yang ingin dicapai Locke dan Latham (1984). Indikator atau elemen dan alat ukur yang digunakan dikembangkan dari Peraturan Pemerintah No. 58/2005 dan Permendagri No.13/2006 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59/2007. Skala yang digunakan adalah skala interval.

### Metode Analisis

Metode analisis data penelitian untuk menguji pengaruh variabel bebas (independen variable) terhadap variabel terikat (dependen variable), dengan analisis regresi linear berganda. Persamaan model regresi berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Kinerja pengelolaan keuangan daerah  
a : Konstanta  
 $b_1 - b_2$  : Slope regresi atau koefisien regresi X  
 $X_1$  : Evaluasi anggaran  
 $X_2$  : Kejelasan sasaran anggaran  
e : Kesalahan (*error term*)

### Kualitas Data

Kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrumen penelitian untuk menguji kuesioner dapat dievaluasi melalui uji validitas (uji *pearson product-moment coefficient of correlation* yakni seluruh pertanyaan dinyatakan valid jika memiliki tingkat signifikan *alpha* dibawah 5%. Serta uji reliabilitas (uji kehandalan) berdasarkan

koefisien *cronbach alpha* yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.

#### **Uji Asumsi Klasik**

Dengan menggunakan model regresi linear berganda pada pembahasan analisis data, maka dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Dimana dalam hal ini ada 3 jenis asumsi yang digunakan, yaitu: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Heterokedastisitas.

#### **Rancangan Pengujian Hipotesis**

Tehnik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian analisis *regresi linier* berganda yang merupakan tehnik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua variabel dan untuk melihat pengaruh baik secara simultan maupun parsial. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menguji hipotesis:

- (a) Untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat digunakan korelasi (R) semakin besar R semakin kuat pula hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.
- (b) Mencari besarnya nilai determinasi atau  $R^2$  yang merupakan koefisien yang menunjukkan kuat tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Untuk menentukan besarnya nilai koefisien determinasi tersebut dilakukan dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi
- (c) Uji simultan (uji F), yaitu untuk menguji apakah variabel independennya secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian statistik ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95% (tingkat signifikan 0,05). Dimana jika  $P < 0,05$  dan  $b > a$  maka  $H_a$  diterima dan menolak  $H_0$  dan sebaliknya. Pengujian ini juga dapat dilakukan jika  $F$  hitung  $> F$  tabel maka  $H_a$  diterima dan sebaliknya untuk menolak  $H_0$ .
- (d) Pengujian secara parsial (uji t) yaitu untuk menguji pengaruh variabel independennya secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas (sig)  $t > \alpha$  (0,05) Keputusan diambil berdasarkan tingkat signifikansi 5%. Apabila tingkat signifikansi di bawah 5%, maka  $H_0$  diterima sedangkan  $H_a$  ditolak dan begitu juga sebaliknya. Pengujian ini juga dapat

dilakukan jika  $t$  hitung  $> t$  tabel maka  $H_a$  diterima dan sebaliknya untuk menolak  $H_0$ .

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Uji Validitas**

Hasil pengujian validitas dengan menggunakan uji Korelasi *Product Moment* syarat minimum suatu item dianggap valid adalah nilai  $r \geq 0,50$  (taraf signifikansi 5%) (Sugiyono, 2009:116). Dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) dapat dilihat bahwa untuk item pertanyaan variabel evaluasi anggaran memperoleh nilai "*sig r*" berkisar antara 0,000-0,000 yang dapat disimpulkan bahwa untuk item pertanyaan variabel evaluasi anggaran seluruhnya dinyatakan valid, karena semua nilai *sig r* variabel tersebut berada di bawah 0,5 (5%). Untuk item pertanyaan variabel kejelasan sasaran anggaran memperoleh nilai  $r$  hitung berkisar antara 0,000-0,000 dengan demikian seluruh item pertanyaan variabel kejelasan sasaran anggaran dinyatakan valid. Untuk item pertanyaan variabel ketiga yaitu variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai *sig r* berkisar antara 0,000-0,000 dengan demikian seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dan dapat diikutsertakan dalam analisis selanjutnya karena nilai *sig r* seluruh item pertanyaan berada di bawah 0,5.

##### **Hasil Uji Realibilitas**

Hasil analisis reliabilitas dapat diketahui bahwa alpha untuk masing-masing variabel yaitu variabel evaluasi anggaran diperoleh nilai alpha sebesar 0.902 yang berarti variabel tersebut dinyatakan handal, variabel kejelasan sasaran anggaran diperoleh nilai alpha sebesar 0.912 dengan demikian variabel tersebut dinyatakan handal, variabel ketiga kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel terikat memperoleh nilai alpha sebesar 0,951 dengan demikian variabel tersebut dinyatakan handal. Dengan demikian pengukuran reliabilitas terhadap semua variabel penelitian menunjukkan pengukuran keandalan memenuhi kredibilitas *cronbach alpha* sebagaimana yang disyaratkan oleh Sekaran (2006:40) yaitu tingkat keandalan data dalam kisaran 0,60-0,70 bisa diterima dan  $> 0,80$  adalah baik.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Pengujian Normalitas

Uji normalitas untuk menguji regresi disyaratkan agar data yang dipakai normal. Untuk mengetahui normalitas distribusi data dilakukan dengan cara melihat nilai residual pada model regresi yang akan diuji. Variabel residual yang terdistribusi normal akan terletak di sekitar garis horizontal (tidak berpencar jauh dari garis diagonal).

#### Pengujian Multikolinearitas

Hasil pengujian ditunjukkan dapat bahwa semua indikator dalam penelitian ini telah bebas dari adanya variabel pengganggu yang dapat mengurangi validitas hasil penelitian, karena diperoleh nilai multikolinearitas berdasarkan nilai *Variance Inflating Factor* (VIF) lebih kecil dari nilai 10.

#### Pengujian Heterokedasitas

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedasitas dapat dilakukan dengan uji Glejser bahwa tingkat signifikansi masing-masing variabel independent diatas 5%, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi heterokedasitas dapat ditolak, hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ .

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara simultan dan parsial terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk ketiga hipotesis penelitian ini, maka hasil tersebut terlihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

$Y = 20,541 + 0,589X_1 - 0,643X_2 + 0,472\varepsilon$					
Variabel Penelitian	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,541	4,854		4,232	0,000
Evaluasi Anggaran	5,995	0,127	0,339	4,641	0,000
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,643	0,100	0,468	6,416	0,000
R		: 0,726	Dependent Variabel (Kinerja Pengelolaan keuangan daerah).		
R Square		: 0,528			
Adjusted R Square		: 0,521			
F Hitung		: 78,785			
Sig. F		: 0,000			

Sumber: Data primer hasil olahan program SPSS

#### a. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama ( $H_{a1}$ )

Berdasarkan Tabel 1.1, Hasil uji F (Anova) *probability* sebesar 0,000 berdasarkan nilai *P value* (nilai signifikansi)  $< 0,05$  maka  $H_{a1}$  diterima ( $H_{01}$  ditolak). Artinya variabel bebas yakni evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yakni kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Nilai *R Square* ( $R^2$ ) diperoleh sebesar 0,528. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruh evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran secara keseluruhan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dimana nilai *R Square*  $(0,726)^2$  sebesar 0,528 menunjukkan bahwa evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran pada SKPA di Pemerintah Aceh berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah sebesar 52,8%. Sedangkan sisanya sebesar 47,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar dari pada penelitian ini.

#### b. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua ( $H_{a2}$ )

Berdasarkan Tabel 1.1, evaluasi anggaran memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 5,995. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, setiap kenaikan pada variabel evaluasi anggaran sebesar 1 satuan atau 100%, maka kinerja pengelolaan keuangan daerah pada SKPA Pemerintah Aceh akan meningkat sebesar 599,5%. Selanjutnya karena nilai *probability* 0,000 berdasarkan nilai *P value* (nilai signifikansi)  $< 0,05$  maka  $H_{a2}$  diterima ( $H_{02}$  ditolak). Artinya, evaluasi anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

#### c. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga ( $H_{a3}$ )

Berdasarkan Tabel 1.1, kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,643. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, jika nilai variabel kejelasan sasaran anggaran naik sebesar 1 satuan atau 100%, maka kinerja pengelolaan keuangan daerah pada SKPA di Pemerintah Aceh akan naik sebesar 64,3%. Selanjutnya karena nilai *probability* 0,000 berdasarkan nilai *P value* (nilai signifikansi)  $< 0,05$ , maka  $H_{a3}$  diterima (maka  $H_{03}$  ditolak). Artinya, kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara simultan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil penelitian pengaruh evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada SKPA di Pemerintah Aceh dapat dilihat dari nilai *R Square* adalah 0,528. Hal ini menunjukkan bahwa, variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 52,8%. Sedangkan 47,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar dari pada penelitian ini seperti halnya partisipasi penganggaran, umpan balik anggaran, tingkat kesulitan pencapaian tujuan anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, ketepatan skedul, dan struktur/desentralisasi yang tidak di masukkan dalam model penelitian (seperti dalam *review* penelitian terdahulu). Dimana evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran dapat menjelaskan varian nilai kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Semua variabel yang diteliti ikut berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemda. Fluktuasi kinerja dalam mengelola keuangan daerah baik itu kenaikan atau penurunan dipengaruhi oleh evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran. Dimana semakin tinggi tingkat evaluasi anggaran yang dilakukan dan tingkat kejelasan atau ketepatan sasaran suatu anggaran pada masing-masing SKPA maka akan meningkatkan kualitas atau ketepatan kinerja dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

#### **Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, evaluasi anggaran yang baik pada setiap SKPA di Pemerintah Aceh berfungsi sebagai jaminan untuk kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tepat dan terarah yang lebih baik. Pengelolaan keuangan yang baik harus mengevaluasi setiap program kegiatan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk memberi fungsi dari sistem keuangan pemerintah daerah yang baik. Sehingga suatu kegiatan tanpa evaluasi terus menerus akan mengakibatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah akan berdampak

buruk terhadap anggaran Pemda.

Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi anggaran dilaksanakan sebagai dasar penilaian kinerja unit kerja. Dimana evaluasi anggaran dengan kinerja memiliki kecenderungan hubungan yang lemah, menurut Kenis (1979) manajer memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam evaluasi kinerja suatu instansi dalam suatu gaya punitive (meningkatkan ketegangan kerja, menurunkan kinerja anggaran).

Evaluasi anggaran harus selalu dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk meningkatkan anggaran sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jalaluddin dan Bahri (2009) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPK setempat. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiyani (2009) menemukan bahwa evaluasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2009) mereka menemukan bahwa evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap sikap aparat dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

#### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil penelitian kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada SKPA di Pemerintah Aceh. Semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran yang dihasilkan aparatur dalam mengelola anggaran Pemerintah daerah, maka akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah setempat. Hal ini dikarenakan aparatur pada masing-masing SKPA sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran kinerja suatu unit kerja/instansi dinilai baik secara *financial*. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan aparatur untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah daerah, sebaliknya apabila tidak adanya kejelasan sasaran anggaran aparatur akan memiliki sedikit informasi mengenai

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Locke dan Schweiger (1979) berpendapat bahwa kejelasan tujuan dapat meningkatkan kinerja manajerial, sedangkan kurangnya kejelasan mengarah pada kebingungan dan ketidakpuasan para pelaksanaan, yang berakibat pada penurunan kinerja. Oleh karena itu, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas diharapkan aparatur Pemerintah daerah dalam hal ini masing-masing SKPA mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian ini sesuai Bangun (2009) menemukan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian Jalaluddin dan Bahri (2009) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPK setempat. Penelitian Sari et al. (2009) menemukan kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap sikap aparat dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Penelitian Nadirsyah et al. (2012) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian Pratiwy (2013) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- DEPUTI IV BPKP. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta: BPKP.
- Dessler, Gary. 2000. *Manajemen Personalialia*. Terjemahan Agus Darma. Jakarta: Erlangga.
- Herawati, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*. 13(2): 9-27.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Ivancevich, J. M. 1976. Effects of Goal Setting on Performance and Job Satisfaction. *Journal of Applied Psychology*, 6(1): 605-412.
- Jalaluddin dan Dafi Bahri. 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 2(1): 44-53.
- Kenis, Izzetin. 1979. Effect of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*, LIV(4): 707-721.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Locke, E.A., dan Latham, G. P. 1984. Goal-setting: A motivational technique that works. *Organizational Dynamics* 8(2): 68-80.
- Locke, E., Latham., 1984. *Goal Setting: A Motivational Technique that Works*. New Jersey: Prentice Hall.
- Locke, E. A. 1968. Toward a theory of task performance and incentives. *Organizational Behavior and Human Performance*, (3):157-189.
- Luthan, Fred. 1989. *Organizational Behavior. International Edition, New york, Seventh Edition. McGraww-Hill*.
- Mia, L. 1989. The Impact of Participation in Budget Setting and Job Difficulty on Managerial Performance and Work Performance: A Research Note *Accounting Organizational and Society*, 14(4): 347-357.
- Milani, Kenneth. W. KEN. 1975. The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study. *The Accounting Review*, 50(2): 274-284.
- Michael, W.S. dan Troy A. 2000. Finacial

- Performance Monitoring and Customer Oriented Government: A Case Study. *Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management*, 12(1):87-105.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Munawar. 2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*. Politeknik Negeri Kupang.
- Nadirsyah, M. Rizal Yahya, dan Gunawan. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. 3(1): 63-71
- Nurhalimah, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintah Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(1): 27- 36
- Pemerintah Aceh. 2007. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara*.
- Sari, Vivi Etika, Yunilma, Y dan Resti Yulistia M. 2009. Pengaruh Budgetary Goal Characteristics terhadap Sikap Aparat dalam Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, E-Journal Universitas Bung Hatta*, 4(1): 101-125.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2010. *Research Methods for Business*. Fifth Edition. West Sussex: John Willey & Son Ltd.
- Steer, R.M. 1975. Task–Goal Attributes, Achievemen, and Supervisory Performance. *Organizational Behavior and Human Performance*, 16: 392-403.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- www.bpk.go.id
- Yusfaningrum. K.dan I. Ghozali. 2005. Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui Komitment Tujuan Anggaran dan Job Relevant Information (JRI) Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, Solo, 15-16 September; 656-6.

